

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa/18 September 2012
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Eks Komisi I DPR RI (Gd. Nusantara/KK I)
Acara	: Audiensi dalam rangka usulan calon daerah otonom baru Kabupaten Muara Digul dan calon Kabupaten Admi Korbai di Kabupaten Mappi Provinsi Papua
Ketua Rapat	: Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Tamu 1. Bupati Kabupaten Mappi beserta jajarannya. 2. DPRD Kabupaten Mappi beserta jajarannya. B. 3 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012 dibuka pukul 14.05 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Mappi pada hari ini yakni terkait audiensi dalam rangka pengusulan calon daerah otonom baru Kabupaten Muara Digul dan calon Kabupaten Admi Korbai di Kabupaten Mappi Provinsi Papua.
3. Bupati Kabupaten Mappi (Stevanus Kaisma) didampingi DPRD Kabupaten Mappi menyampaikan beberapa hal terkait pengusulan daerah otonom baru di Kabupaten Mappi yakni:
 - a. Meneruskan aspirasi masyarakat Suku Auyu dan Suku Korwai Kombai di Selatan Papua yang menginginkan pemekaran daerah baru di Kabupaten Mappi yaitu calon Kabupaten Muara Digul di Bade dan calon Kabupaten Admi Korbai di Senggo untuk mendapatkan dukungan dan hak inisiatif dari DPR RI yang kemudian dapat diagendakan dalam pembahasan dan pengusulan ke Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan calon Kabupaten Muara Digul dan calon Kabupaten Admi Korbai.

- b. Keunggulan potensial calon Kabupaten Muara Digul dan calon Kabupaten Admi Korbai adalah terutama sektor perkebunan dan kehutanan seperti karet, kulit kayu masohi, dan gambir. Daerah ini juga sudah dipersiapkan sejak lama untuk menjadi sebuah kabupaten dengan dicanangkannya sebagai kecamatan percontohan. Untuk calon Kabupaten Admi Korbai, masih terdapat komunitas suku terasing, terolisir, terbelakang akibat kurang mendapat sentuhan pemerintah.
 - c. Kabupaten Mappi terletak ditengah-tengah antara Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke di selatan Papua. Luas wilayah Kabupaten Mappi 28.516 Km² yang terdiri dari 15 distrik (*Obba di Kepi, Eera di Bade, Nambiomani Bapai di Mur, Haju di Yagatsu, Assue di Eci, Ciak Mitak di Senggo, Passue di Kotiak, Venaha di Sahapikia, Minyakur di Kabe, Kaibar di Amazu, Bamgi di Yeloba, Syaha Me di Asset, Yakomi di Yame, Passue Bawah di Wonggi, Ti Zain di Kumaban*), 136 kampung dan 1 kelurahan dan dengan pendanaan yang terbatas menyebabkan rentan kendali pemerintah menjadi jauh sehingga membuat pelayanan kurang optimal khususnya untuk daerah yang tertinggal. Adanya kondisi demikian maka perlu ada upaya untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan.
 - d. Dari luas wilayah Kabupaten Mappi tersebut 70% ditutupi hutan mangrove, sagu, nipah rawa permanen, dan savana yang sangat luas dan 30% dari luas wilayah ditutupi hutan tropis dengan ketinggian dari permukaan laut: 0 – 60 meter sehingga sebagian besar wilayahnya hanya bisa ditempuh dengan jalur sungai yang menyebabkan jauh dan sulitnya menjangkau daerah pedalaman serta menyebabkan biaya transportasi sangat mahal dan tidak efisien.
 - e. Adanya kondisi yang demikian maka timbul desakan aspirasi dari sebagian besar masyarakat suku Auyu yang merupakan suku terbesar di selatan Papua dan Suku Kurwai Kombai yang masih merupakan suku terasing di selatan Papua yang mana mereka menginginkan perubahan serta rumah sendiri (Kabupaten sendiri) di wilayah Kabupaten Mappi yang sangat luas dan masih terisolir.
 - f. Adapun persyaratan yang dipenuhi sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 seperti persyaratan administrasi, teknis dan juga fisik kewilayahan.
4. Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan audiensi Bupati Kabupaten Mappi sebagai berikut:
- a. Komisi II DPR RI siap menindaklanjuti hasil audiensi Pemerintah Kabupaten Mappi dengan akan mengunjungi calon Kabupaten Admi Korbay di Senggo dan Calon Kabupaten Muara Digul di Edera Bade yang mana kunjungan kerja tersebut merupakan rangkaian persyaratan yang wajib dilakukan oleh DPR RI.
 - b. Disarankan kepada Bupati dan jajarannya melakukan pertemuan dengan Mendagri atau Dirjen Otda untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi di masyarakat khususnya di wilayah Papua tidak bisa disama ratakan dengan wilayah lain di Indonesia. Wilayah Papua yang luas dan terisolir sudah jelas sangat membutuhkan pemekaran wilayahnya agar mempersempit rentang kendali pelayanan.
 - c. Terkait dengan sejumlah dokumen persyaratan yang telah diterima oleh Komisi II DPR RI, ada beberapa yang patut dilengkapi agar segera dilengkapi, seperti rincian dokumen asset-asset dan personil, keputusan Bamuskam, Rekomendasi Bupati juga DPRD Mappi serta hal lainnya.

II. KESIMPULAN

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan bahwa Komisi II DPR RI mengapresiasi masukan/aspirasi yang disampaikan Bupati Kabupaten Mappi dan DPRD Kabupaten Mappi, serta mengingatkan agar senantiasa mengikuti Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dalam proses Pembentukan Kabupaten Daerah Otonom Baru tersebut. Komisi II DPR RI juga menyampaikan bahwa tujuan utama Pembentukan daerah otonom baru yakni untuk kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah rentang kendali.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.15 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

GANJAR PRANOWO
A-365